

**EVALUASI PELAKSANAAN DISTRIBUSI SUBSIDI PUPUK DI KABUPATEN
SUMBAWA, PROPINSI NTB**

***EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF FERTILIZER SUBSIDY
DISTRIBUTION IN SUMBAWA DISTRICT, NTB PROVINCE***

Ieke Wulan Ayu^{1*}, Nila Wijayanti², Sri Rahayu³, Usman⁴

^{1*,2}Fakultas Pertanian, Universitas Samawa, Sumbawa, NTB

^{3,4}Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Samawa, Sumbawa, NTB

*Penulis korespondensi: iekewulanayu002@gmail.com

ABSTRACT

Provision of fertilizer subsidies by the government aims to increase yield productivity and farmers' income as well as a sustainable environment. The purpose of the study was to evaluate the distribution of subsidized fertilizers. The research was carried out from July to September 2021 in Plampang District, Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, using qualitative descriptive analysis techniques. Research respondents consisted of farmers receiving subsidized fertilizers, retailers of subsidized fertilizers, distributors of subsidized fertilizers, agricultural field officers who were directly involved in handling the distribution of subsidized fertilizers. Data collection techniques used observation, interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of the distribution of subsidized fertilizers in Plampang District, Sumbawa Regency related to the six exact methods (type, price, quantity, place, time, and quality) requires improvement, so that the fertilizer subsidy policy This provides the greatest benefit to farmers.

Keywords: *subsidized fertilizer, distribution, farmers*

ABSTRAK

Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil dan pendapatan petani serta lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kegiatan distribusi pupuk bersubsidi. Penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Responden penelitian terdiri dari petani penerima pupuk subsidi, pengecer pupuk bersubsidi, distributor pupuk bersubsidi, petugas pertanian lapangan yang terkait secara langsung dalam menangani distribusi pupuk bersubsidi. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa terkait enam tepat (jenis, harga, jumlah, tempat, waktu, dan mutu) memerlukan penyempurnaan, agar kebijakan subsidi pupuk ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi petani.

Kata kunci: pupuk subsidi, distribusi, petani

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam penyediaan pangan untuk masyarakat, dan menopang sektor lainnya. Pertanian penting untuk ekonomi domestik dan pengontrol PDB di beberapa negara berkembang (FAO, 2021), menghasilkan bahan baku untuk peningkatan bagi produk sektor industri dan jasa, menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor, pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri, dan mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain (Hendrawan, 2011).

Pencapaian peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian menjadi tantangan pada beberapa komoditas pertanian pada Tahun 2021 oleh pemerintah, yaitu padi (62,5 juta ton), jagung (31,9 juta ton), kedelai (0,51 juta ton) (Renstra Kementan 2020-2024). Tantangan tersebut menjadi beban yang lebih besar bagi petani pedesaan, khususnya petani kecil (Westermann *et al.*, 2018) yang memiliki lahan di bawah 2 hektar (Gathala *et al.*, 2021). Namun, pertanian skala kecil menjadi salah satu pendorong terbaik untuk mendorong ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan (Smith *et al.*, 2018), sehingga peningkatan kerja pertanian harus dapat dijamin oleh pemerintah dalam mengejar pencapaian produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

Peningkatan kerja sektor pertanian sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satunya pupuk. Pupuk merupakan salah satu input produksi yang menentukan produktivitas, sehingga ketersediaan pupuk secara kuantitas, kualitas dan harga harus mendapat jaminan dari pemerintah. Pupuk merupakan salah satu unsur penting dan strategis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usahatani (Darwis dan Supriyati, 2013). Pemanfaatan pupuk yang memadai dalam jumlah, kualitas dan kontinuitasnya diperlukan untuk meningkatkan kesuburan tanah, dengan perkiraan hasil produksi sebesar 30 sampai 40 % (Burhan *et al.*, 2011). Penggunaan input pupuk sangat strategis, selain benih unggul, air dan tenaga kerja (Gunawan, 2018).

Pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian sebagai upaya dalam peningkatan produktivitas, salah satunya dengan menerapkan kebijakan subsidi pupuk, dan menjamin ketersediaan serta harga pupuk. Pemberian subsidi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman dengan mempertahankan daya beli petani atas jenis pupuk tertentu. Subsidi dan kebijakan pertanian dapat memiliki dampak ekonomi dan lingkungan, termasuk efek pada produksi pertanian dan pendapatan petani (Wegren, 2016). Keberlanjutan populasi yang berkembang pesat, menjadi tantangan di tengah kelangkaan sumber daya dan eksternalitas lingkungan (Durham *et al.*, 2021).

Kebijakan subsidi pupuk merupakan kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Subsidi pertanian mendorong spesialisasi pertanian dan meningkatkan hasil pertanian (Yi *et al.*, 2016), serta secara langsung mempengaruhi pendapatan petani, sedangkan pendapatan dapat ditingkatkan melalui produktivitas pertanian dari subsidi (Kirwan *et al.*, 2016). Program pupuk subsidi, meningkatkan produktivitas kerja petani sebesar 71,4% di kelurahan Batu (Hasmi *et al.*, 2021). Evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dapat memenuhi prinsip 6 tepat. Prinsip 6 tepat tersebut adalah tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Kementerian Pertanian membuat kebijakan agar distribusi pupuk bersubsidi dapat memenuhi asas 6 tepat (jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga) (Jorgi *et al.*, 2019), agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang di anjurkan. Namun, secara umum indikator keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi ke tingkat petani sesuai prinsip 6 tepat tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Distribusi pupuk terkendala kelangkaan pupuk,

penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga di atas HET, perembesan pupuk bersubsidi ke pasar nonsubsidi dan antar wilayah (Kariyasa dan Yusdja, 2005). Masalah lain yang ditimbulkan oleh kebijakan subsidi pupuk, yaitu: distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, dualisme pasar, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat. Hadi *et al.* (2007) menjelaskan bahwa, kebijakan subsidi dan sistem distribusi pupuk yang amat komprehensif, tidak menjamin ketersediaan pupuk ditingkat petani. Badan Kebijakan Fiskal (2017) menyebutkan masalah yang muncul akibat terdapat dua pupuk di pasaran (subsidi dan nonsubsidi), di antaranya: pengoplosan pupuk subsidi dan nonsubsidi, penyebaran isu tentang kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga harganya mahal, terjadi penimbunan dan penggantian kemasan pupuk subsidi menjadi pupuk tidak disubsidi. Keterbatasan akses ke input pertanian tetap menjadi penghalang penting untuk meningkatkan pertanian produksi di negara berkembang (Anglade *et al.*, 2021). Kekhawatiran sosial dan perubahan pasar pangan dapat meningkatkan hubungan antara para pelaku dalam rantai nilai pertanian pangan, dan menjadi ukuran kelembagaan untuk memastikan kualitas dan kuantitas input untuk distributor (Ragasa *et al.*, 2018).

Permasalahan yang menghambat pendistribusian kebutuhan pupuk bersubsidi akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi petani atau kelompok tani sehingga berimbas pada menurunnya produktivitas hasil tani dan menurunnya pendapatan petani. Pendistribusian pupuk bersubsidi yang belum optimal akan berdampak pada tidak tercapainya ketersediaan enam prinsip tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu serta kehidupan petani (Adnyana *et al.*, 2019). Suryana *et al.* (2016) menjelaskan bahwa permasalahan utama kinerja subsidi pupuk pada sisi perencanaan, distribusi dan pengawasan, termasuk keterbatasan anggaran belanja pemerintah.

Perbaikan distribusi pupuk bersubsidi sangat membutuhkan informasi dalam memperbaiki aransemen kelembagaan kebijakan subsidi harga pupuk, utamanya enam tepat pada subsidi pupuk yang merujuk pada tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat harga dan tepat waktu. Distribusi sebagai aktivitas pemasaran yang menciptakan nilai tambah produk yang dapat merealisasikan kegunaan bentuk, waktu, tempat dan kepemilikan, serta mampu mempelancar arus saluran distribusi (Rahmaningsih *et al.*, 2021), Ketersediaan pupuk yang berkualitas dan mampu untuk mencukupi kebutuhan untuk produksi pertanian sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan usahatani di Kabupaten Sumbawa. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu salah satu kecamatan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani padi sawah, jagung, penerima pupuk bersubsidi, dan terdapat masalah terkait enam tepat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi (*field Observation*), survei (*Field Survey*), wawancara (*Interview Method*), dan kuisioner. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari karakteristik responden dan informasi yang berkaitan dengan sistem distribusi pupuk di tingkat petani. Data sekunder terdiri dari data pendukung yang dikutip dari laporan dan buku statistik instansi terkait. Responden penelitian adalah petani penerima pupuk bersubsidi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis deskriptif dengan tabulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Petani

Karakteristik responden meliputi identitas responden yang terdiri dari: umur, luas lahan, jenis usaha tani, dan jenis pupuk.

1. Umur

Umur sangat erat kaitannya dengan kemampuan fisik. Responden penelitian memiliki usia produktif sebesar 100%, dengan rentang umur ≤ 30 tahun dan 41 – 45 tahun (44%). Petani pada usia produktif memiliki kemampuan fisik yang baik dalam mengelola usahatani dibandingkan dengan petani usia tidak produktif. Usia produktif dapat menjadi asset sumberdaya yang akan dapat mendorong pendukung percepatan adopsi teknologi usahatani (Ayu *et al.*, 2018a). Aspek umur merupakan salah satu identitas yang dapat dijadikan indikator untuk mengungkapkan posisi seseorang dalam hubungannya dengan produktivitas kerja. Umur dioperasikan sebagai aktivitas kehidupan pria dan wanita pertanian lahan kering (Sindhuja dan Ashokan, 2018).

2. Luas Lahan Pertanian

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi hasil produksi usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki lahan untuk pertanian seluas 1,01 – 2,00 ha (52 %). Luas lahan terkecil seluas $\leq 1,00$ Ha (30%) dan terbesar 4,01- $\geq 5,01$ Ha (4%), yang disertai ketidakpastian dalam pengelolaannya. Semakin sempit lahan yang digunakan untuk usahatani, maka jumlah yang dihasilkan akan semakin rendah, kecuali bila suatu usahatani dijalankan dengan menerapkan teknologi yang tepat. Lahan yang dimiliki sering tidak subur dan terpengar-pencar dalam beberapa petak.

3. Jenis Usahatani

Usahatani yang banyak dilakukan oleh petani di Kecamatan Plampang yaitu usahatani jagung (56%) dan usahatani padi (16%). Sebagian besar usahatani padi dan jagung dilakukan dengan pola tanam dengan tanaman padi dan jagung serta mengandalkan hujan untuk lahan kering dan irigasi untuk sawah. Penggunaan pola tanam dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan peningkatan pendapatan petani (Ayu *et al.*, 2018b). Faktor jenis tanaman yang diusahakan, dan teknologi berdampak pada faktor perantara seperti koperasi, akses pasar, pengetahuan dan keterampilan, kualitas produk, teknologi, dan dukungan dapat mempengaruhi pendapatan petani. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi kapasitas yang dapat meningkatkan daya saing petani. Daya saing yang lebih kuat, harga yang lebih tinggi, peningkatan produktivitas, dan biaya yang lebih rendah dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam jangka panjang (Hoang, 2021).

3. Jenis Pupuk

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik. Mayoritas petani di Kecamatan Plampang menggunakan jenis pupuk kimia, yaitu NPK, Urea, dan Za (52 %), dan pupuk organik (26%). Pupuk kimia banyak digunakan di banyak bidang pertanian dan telah berkontribusi untuk mencapai ketahanan pangan global (Gourevitch *et al.*, 2018; Kopittke *et al.*, 2018; Liu *et al.*, 2020). Penambahan pupuk organik yang dilakukan oleh petani, dengan kombinasi pupuk kimia dilakukan untuk memperbaiki kesuburan tanah, karena pemberian pupuk kimia secara terus menerus dapat menurunkan kesuburan dan menyebabkan keracunan pada tanah. Integrasi pupuk organik dan anorganik akan meningkatkan produksi tanaman dan kelestarian lingkungan (Kanton *et al.*, 2016).

Evaluasi Distribusi Pupuk

Hasil evaluasi distribusi pupuk di wilayah Kecamatan Plampang pada petani, pengecer, distributor, dan penyuluh pertanian, sebagai berikut:

a. Petani:

1. Tepat Jenis

Terdapat 6 jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah diantaranya yaitu NPK, SP-36, Urea, ZA, NPK formula khusus, Organik. Namun terdapat ketidaksesuaian antara jenis yang harus dipakai dengan jenis pupuk yang didapat. Petani mengharapkan agar pupuk bersubsidi tersebut memiliki kualitas yang sama dengan pupuk non subsidi.

2. Tepat Harga

Kesesuaian antara harga eceran pupuk yang ditetapkan pemerintah dengan harga pupuk yang diperoleh petani. HET pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku saat ini yaitu Urea Rp .2.250 (Kg/Liter), SP 36 Rp 2.400 Kg/Liter, ZA 1.700 Kg/Liter, NPK 2.300 Kg/Liter, NPK Formula 3.300 Kg/Liter, Organik Granul 800 Kg/Liter, Organik Cair 20.000 Kg/Liter. Ketidaktepatan harga pupuk yang diterima petani dikarenakan adanya biaya-biaya tambahan, seperti biaya transportasi dari pengecer ke kios maupun dari pengecer langsung ke kelompok tani. Banyak petani yang memiliki lokasi jauh dari kios pengecer menambah biaya transportasi dari pengecer sampai ke lahan mereka secara mandiri sehingga terdapat biaya transportasi yang bervariasi dan di akumulasi menjadi biaya pupuk. Kelompok tani yang memiliki jarak antara tempat pengencer ke tingkat distributor pupuk bersubsidi jauh dan biaya tenaga kerja yang di pakai pengencer, sehingga tingkat pengencer menjual pupuknya kepada petani sudah tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah sedangkan harga yang di peroleh pengencer dari distributor tidak pernah melebihi harga yang sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan (Kartini, 2020). Mokhtar (2019) menyatakan bahwa harga pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani berbeda-beda yang diterapkan harga rata-rata di atas harga yang seharusnya. Panjangnya rantai distribusi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dapat memicu harga dan potensi berkurangnya pupuk di pasaran (Ragimun *et al.*, 2020).

3. Tepat Jumlah

Ketidaktepatan jumlah yang dimaksud oleh petani, yaitu jumlah pupuk yang diberikan oleh pemerintah dibatasi hanya 2 ha perKK. Dampak lanjutannya adalah menurunnya jumlah produksi dan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Sistem pendistribusian pupuk disetiap daerah yang tidak didasarkan pada permintaan aktual atau tidak didasarkan pada besarnya kebutuhan petani sesuai tipologi lahannya, mengakibatkan terjadinya kelebihan suplai pupuk atau kelangkaan pupuk serta permasalahan belum diketahuinya efisiensi dari penggunaan pupuk oleh petani. Petani pengelola lahan kurang dari 0,5 hektar hanya menerima 40% dari total subsidi pupuk (Rachman dan Sudaryanto, 2010). Perbedaan volume pupuk bersubsidi terjadi bukan hanya antara usulan daerah dan alokasi penyediaan dari pemerintah, namun terjadi antara alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah dengan realisasi penyerapannya. Adanya mismatch (ketidaksesuaian) antara usulan dan rancangan alokasi pupuk bersubsidi akan menyebabkan kelangkaan pupuk di lapangan seperti yang terjadi hampir setiap musim tanam karena penyediaan pupuk bersubsidi jauh lebih rendah dari kebutuhannya (Nugroho *et al.*, 2018). Tidak efisien dan sering Penggunaan pupuk yang tidak seimbang menghambat petani untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terbukti dari masa lalu penelitian bahwa petani telah terpaksa menerapkan pupuk pada tingkat yang tidak tepat yang tidak cocok baik dengan kebutuhan hara tanaman tertentu (Bagum, 2021).

4. Tepat Tempat

Pengertian tempat adalah suatu kondisi di mana petani membeli pupuk bersubsidi di lini IV atau kelompok tani sesuai ketentuan. Terdapat ketidaktepatan tempat dikarenakan, pupuk yang diterima tidak langsung sampai ke rumah petani. Pupuk tersebut didistribusikan ke kelompok tani. Panjangnya rantai distribusi dan kesenjangan harga antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi juga menyebabkan adanya pengoplosan pupuk subsidi dengan non subsidi dan terjadinya pemalsuan pupuk bersubsidi yang akhirnya berimplikasi pada kualitas pupuk bersubsidi. Manajemen rantai pasok merupakan aktivitas manajemen produksi suatu produk dari awal hingga sampai ke tangan konsumen (Wijayanti *et al*, 2019).

5. Tepat Waktu

Prinsip asas tepat waktu adalah waktu seharusnya petani mendapatkan jatah pupuk bersubsidi ketika petani membutuhkannya. Kesesuaian periode ketersediaan pupuk dengan jadwal pemupukan yang dilakukan oleh petani. Namun, terdapat ketidaktepatan waktu pendistribusian pupuk terjadi oleh karena beberapa hal, yaitu adanya kendala di perjalanan seperti macet, kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan penyebrangan mengalami kendala. Hal inilah yang menyebabkan pendistribusian tersebut tidak tepat waktu, sehingga pada saat masa tanam tiba, pupuk belum tersedia. Darwis *et al.*, 2013 menyatakan bahwa produsen dan distributor tidak mengirim pupuk ke distributor atau ke pengencer sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi ini menyalahi tepat waktu dan masalah ini bisa diatasi apabila masing-masing lini melaporkan secara berkala atau setiap bulan secara berjenjang. Panjangnya rantai pasok yang membutuhkan waktu dapat menjadi latar belakang terjadinya penyelewengan distribusi. Penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, terjadi karena kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, dan bias terhadap sasaran/target (Adiraputra *et al.*, 2021).

6. Tepat Mutu

Kesesuaian antara karakteristik pupuk yang seharusnya diterima petani khususnya kandungan kimianya, dengan karakteristik pupuk yang secara nyata diperoleh petani. Asas tepat mutu merujuk pada keaslian pupuk bersubsidi yang memiliki standarisasi kualitas pupuk. Selain itu beberapa jenis pupuk bersubsidi terkadang memiliki kualitas yang kurang baik saat didistribusikan, sehingga petani merasa terganggu dengan kualitas pupuk bersubsidi yang diterima. Ketidaktepatan mutu dikarenakan, pupuk bersubsidi mempunyai kualitas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Petani mengharapkan agar pupuk bersubsidi mempunyai mutu atau kualitas yang sama dengan pupuk non subsidi.

Pengecer:

1. Tepat Jenis

Beberapa jenis pupuk bersubsidi yang dijual oleh pengecer sesuai dengan yang peraturan pemerintah yaitu Urea, NPK, ZA, SP36 dan Organik.

2. Tepat Harga

Pengecer mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk petani. Namun HET tersebut hanya berlaku sampai ke pengecer dalam artian petani mengambil sendiri ke pengecer, pada kenyataannya banyak kelompok tani meminta pupuk bersubsidi diantarkan ke lokasi kelompok tani. Hal tersebut membuat biaya pupuk bersubsidi menjadi lebih mahal dikarenakan harus memberikan tambahan uang ongkir kirim pada sopir. Harga yang diperoleh pengecer dari distributor tidak pernah melebihi harga yang sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan.

3. Tepat Jumlah

Alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan yang tertera pada RDKK Tani, sehingga pemerintah memberikan perhitungan pembagian pupuk bersubsidi berdasarkan luas lahan.

Kebijakan pupuk bersubsidi dari pemerintah bertujuan untuk menyediakan pupuk dengan harga murah bagi petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 hektar, sehingga pupuk bersubsidi dapat terjamin ketersediaanya dan harganya sesuai HET pupuk.

4. Tepat Tempat

Pengecer/kios tidak dapat menjual pupuk bersubsidi diluar wilayahnya, dikarenakan sudah ada aturan dari pemerintah bahwa tidak diperbolehkan menjual di luar wilayahnya. Pembelian pupuk bersubsidi oleh pengecer juga sesuai dengan distributor wilayah kerjanya sesuai yang diatur.

5. Tepat Waktu

Keterlambatan ketersediaan pupuk pernah terjadi di Kabupaten Sumbawa, dikarenakan petani seluruh daerah yang menebus secara bersama dengan gudang penyimpanan terbatas.

6. Tepat Mutu

Beberapa pengecer mengetahui kandungan tiap jenis pupuk bersubsidi, kandungan pupuk bersubsidi ini rutin dilakukan pengecekan oleh Dinas Pertanian. Kebutuhan pupuk bersubsidi petani yang tidak terbatas mengurangi kemungkinan terjadinya pupuk bersubsidi yang melewati batas kadaluarsa.

Distributor:

1. Tepat Jenis

PT. Bangun Alam Samawa yang mulai berdiri pada tahun 2014 dan berlokasi di Jl. Lintas Sumbawa-Bima Km. 18 Batu Ongo Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa-NTB, merupakan distributor resmi dari PT Petrokimia Gresik and PT Pupuk Kaltim.

2. Tepat Harga

Distributor mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk petani. Harga yang diperoleh distributor dari produsen tidak pernah melebihi harga yang sudah diatur oleh dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan sistem tertutup melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) (Gunawan *et al.*, 2020).

3. Tepat Jumlah

PT. Bangun Alam Samawa, memiliki wilayah distribusi 8 Kecamatan (Kecamatan , Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Labangka, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung, dan Kecamatan Orong Telu). Pupuk yang diterima sebanyak 5.400 ton/bulan, dengan waktu pendistribusian berbeda-beda per bulan tergantung e-RDKK dan kemampuan pengecer dalam menebus pupuk bersubsidi dari distributor. PT. Bangun Alam Samawa (PT. Basa) telah menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK, namun pembatasan oleh jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang diperoleh dari produsen. dan adanya kebijakan pembatasan alokasi pupuk bersubsidi kepada petani sehingga menyebabkan tidak dapat terpenuhinya seluruh kebutuhan petani terhadap pupuk melalui pupuk bersubsidi.

4. Tepat Tempat

Distributor tidak dapat menjual pupuk bersubsidi diluar wilayahnya, terlebih dengan adanya aturan ketat yang tidak diperbolehkan menjual di luar wilayahnya. Pengadaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi pada lini III dilakukan melalui produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya, pada penyalur lini IV dilakukan oleh distributor kemudian menyalurkan kepada pengecer resmi yang ditunjuk di wilayah kerjanya, untuk petani/kelompok tani, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya

5. Tepat Waktu

Keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi kerap kali terjadi di Kabupaten Sumbawa, hal ini dikarenakan pembelian ke produsen yang bersamaan dengan distributor lain. Lama waktu penyimpanan pupuk tergantung RDKK, didistribusikan langsung ke pengecer di Kecamatan Pelampang sebagai salah satu kecamatan yang menjadi wilayah yang menjadi tanggung jawab.

6. Tepat Mutu

Distributor mengetahui kandungan tiap jenis pupuk bersubsidi melalui uji lab yang rutin dilakukan pengecekan oleh Dinas Pertanian ± 3 bulan sekali.

Penyuluh Pertanian:

1. Tepat Jenis

Sosialisasi terkait cara membedakan pupuk bersubsidi asli dan palsu sering dilakukan oleh Dinas Pertanian pada 18 kecamatan minimal 2 kali sebulan sebelum masa tanam dan setelah masa panen.

2. Tepat Harga

Pembelian pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dimana harga pupuk bersubsidi harus sesuai dengan yang tertera dalam: 1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021; 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian; dan 4) Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 361/kpts/RC. 210/B/06/2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021.

3. Tepat Jumlah

Alokasi pupuk bersubsidi tersebut belum sesuai jumlahnya dengan jumlah kebutuhan yang tertera dalam RDKK Tani.

4. Tepat Tempat

Dalam penjualan atau pembelian pupuk bersubsidi Kelompok Tani, Pengecer dan Distributor tidak dapat membeli diluar wilayah kerjanya dikarenakan penggunaan sistem alur tertutup.

5. Tepat Waktu

Keterlambatan waktu ketersediaan pupuk bersubsidi pada saat masa tanam pernah terjadi di Kecamatan Pelampang.

6. Tepat Mutu

Kegiatan sosialisasi tetap diselenggarakan untuk mengetahui perbandingan kandungan pupuk tiap tanaman pada rapat BPP, dan pengecekan rutin dilakukan.

Hasil evaluasi distribusi pupuk berdasarkan prinsip enam tepat belum efektif ditingkat petani, pengecer, distributor, serta BPP sebagai bagian dari Pemerintah. Ketidakefektifan di tunjukkan oleh belum optimalnya kegiatan pada setiap tingkatan, disebabkan oleh: a) Kurangnya

Sosialisasi Sistem RDKK Terhadap Kelompok Tani/Petani. Sosialisasi mengenai program subsidi pupuk memang terjadi di kalangan masyarakat petani dikarenakan kurang paham dalam artian informasi dari pemerintah masih samar-samar sehingga mengakibatkan petani kurang mengoptimalkan haknya dalam memperoleh pupuk. Situasi yang demikian bertolak belakang dengan prinsip good governance menurut UNDP (Basuki dan Shofwan, 2006) yaitu transparansi yang berarti menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Staton (1996) menjelaskan bahwa salah satu sub sistem dalam distribusi fisik adalah pengendalian persediaan yang bertujuan untuk memenuhi pesanan pelanggan secara cepat dan tepat. Hal ini yang ternyata belum berjalan dengan baik sehingga kelangkaan pupuk terjadi di kalangan masyarakat petani. Produsen belum dapat memperkirakan secara tepat kebutuhan optimal pesanan pupuk oleh petani sehingga mengakibatkan keadaan persediaan pupuk habis;

b) Peningkatan Fungsi Pengawasan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Pengawasan sangat perlu ditingkatkan di dalam pendistribusian pupuk guna menghindari adanya kecurangan atau penyelewengan yang dapat merugikan banyak pihak. Pengawasan yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat. Public controlling sebaiknya dijadikan jaminan agar pelaksanaan pendistribusian pupuk berjalan sesuai standar yang ditetapkan dalam perencanaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian, yaitu

- Implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi ditinjau dari segi ketepatan tempat, ketepatan jumlah, ketepatan harga, ketepatan jenis, ketepatan waktu, ketepatan mutu masih memerlukan perbaikan.
- Perbedaan harga pupuk terjadi karena kondisi lokasi, dan pembayaran pupuk yang dilakukan setelah panen oleh petani, sehingga menjadi biaya tambahan dan menjadi harga pupuk.

Saran

- Pemerintah harus memastikan percepatan dan mitigasi hambatan implementasi kartu tani di daerah. Implementasi penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi harus diperketat dengan kolaborasi dari pihak-pihak terkait agar penerima dan pemakaian pupuk bersubsidi dapat efektif, tepat sasaran, dan tepat guna.
- KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian benih/pupuk bersubsidi.
- Dinas pertanian harus intensif dalam melakukan sosialisasi ke petani, dan perlunya *up date data base* untuk pengawasan ketepatan penyaluran pupuk Urea, melalui RDKK belum menjamin adanya kebenaran luas lahan garapan yang dicantumkan masing masing anggota petani. sehingga, kesesuaian data sangat perlu disesuaikan dengan data yang terbaru dari Dinas Pertanian.
- Dinas pertanian membuat aturan-aturan lokal yang dapat dimengerti oleh petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiraputra, P., Supyandi, D., dan Java, W. 2021. "The Effectiveness of Fertilizer Subsidy : How the Impact to the Production". SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 15(2), 345–356 <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/SOCA.2021.v15.i02.p10>

- Adnyana, I. P., dan Mohktar, M. S. 2019. "Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB". *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 13(2), 201-217.
- Anglade, B., Swisher, M. E., Koenig, R. "The Formal Agricultural Input Sector: A Missing Asset in Developing Nations Sustainability 2021". 13. 10697. <https://doi.org/10.3390/su131910697>.
- Ayu, I.W., Husni, T. S., Soemarno dan S. Priyono., dan Iskandar, S. 2018a. "Analisis Karakteristik Demografi dan Sosial Ekonomi Petani Lahan Kering Iklim Kering Di Dusun Brang Pelat, Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa". *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan(JRCTL)*. 1(2), 70-79.
- Ayu, I.W., Husni, T. S., Soemarno dan S. Priyono. 2018b. "Assessment of Rice Water Requirement by Using Cropwat Model in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara, Indonesia". *Vegetos*. 31 (2). Doi: 10.4172/2229-4473.1000409.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2017. "Seri Analisis Kebijakan Fiskal: Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bagum, T., Uddin, M.K., Hassan, S., Kamarulzaman, N.H., Rahman, M.Z., Haque, A.N.A. "Contribution of Selected Factors on Farmers' Work Performance towards Fertilizer Application in Rice of Bangladesh". *Sustainability*. 13, 10795. <https://doi.org/10.3390/su131910795>
- Basuki dan Shofwan. 2006. "Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance." Malang: SPOD-FE UNIBRAW.
- Burhan, M Umar ., Suman, Agus., M Pudjiharjo., Noer Soetjipto.2011. "Analisis Ekonomi Terhadap Struktur, Perilaku, Dan Kinerja Pasar Pupuk Di Jawa Timur (Kasus Di Kabupaten Lumajang Dan Kabupaten Ngawi)". *Journal of Indonesia Applied Economics*. Vol 5, No 1 (2011) <https://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/113>
- Darwis, V dan Supriyati. 2013. "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan dan Optimalisasi Pemanfaatannya". *Analisis Kebijakan Pertanian*. 11 (1); Pp. 45-60. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Durham, Timothy C., and Tamás Mizik. 2021. "Comparative Economics of Conventional, Organic, and Alternative Agricultural Production Systems". *Economies* 9: 64. <https://doi.org/10.3390/economies9020064>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2021. "Agricultural Value Chain Study in Iraq: Dates, Grapes, Tomatoes and Wheat. FAO: Baghdad, Iraq, 2021:ISBN 978-92-5-133634-2.
- Gathala, M. K., Laing, A. M., Tiwari, T. P., Timsina, J., Rola-Rubzen, F., Islam, S., Maharjan, S., Brown, P.R., Das, K.K., Pradhan, K. 2021. "Improving smallholder farmers' gross margins and labor-use efficiency across a range of cropping systems in the Eastern Gangetic Plains". *World Dev.* 138, 105266.
- Gourevitch, J.D.; Keeler, B.L.; Ricketts, T.H. "Determining Socially Optimal Rates of Nitrogen Fertilizer Application". *Agric. Eco-syst. Environ.* 2018, 254, 292–299.
- Gunawan, E., Pasaribu, S. 2020. "Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi". 20 (2). <https://jurnalekonomi.lipi.go.id>
- Gunawan, F. 2018. "Pengaruh Penggunaan Faktor Produksi Terhadap Produksi Padi Di Desa Barugae Kabupaten Bone". *Jurnal Pertanian*. <https://eprints.unm.ac.id>
- Hadi, P.U., D.K. Swastika, F.B.M. Dabukke, N.K. Agustin, M. Siregar, D. Hidayat, dan M. Maulana. 2007. Analisis Penawaran dan Permintaan Pupuk di Indonesia 2007 – 2012. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor

- Hasmi., Uceng, A., Kalrah, A. 2021. “Evaluasi Program Pupuk Subsidi Terhadap Produktivitas Kerja Kelompok Tani Kelurahan Batu”. JIA. 9 (3).
- Hendrawan, 2011. “Penentuan Pola Subsidi dan Sistem Distribusi Pupuk di Indonesia. Analisis Kebijakan Pupuk”. Jurnal Manajemen dan Agribisnis: 8 (2).
- Hoang, V. 2021. “Impact of Contract Farming on Farmers’ Income in the Food Value Chain: A Theoretical Analysis and Empirical Study in Vietnam”. Agriculture 2021, 11(8): 797. <https://doi.org/10.3390/agriculture11080797>
- Kanton, R. A. L., Prasad, P. V. V., Mohammed, A. M., Bidzakin, J. K., Ansoba, E. Y., Asungre, P. A., Sugri, I. . 2016. “Organic and inorganic fertilizer effects on the growth and yield of maize in a dry agro-ecology in Northern Ghana”. J. Crop Improv 30, 1–16.
- Kariyasa, K. dan Y. YUSDJA. 2005. Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk Urea di Indonesia: Kasus Provinsi Jawa Barat. Analisis Kebijakan Pertanian 3(3): 201-216.
- Kartini. 2020. :Analisis Distribusi dan Pemasaran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa”. Skripsi. <http://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 361/kpts/RC. 210/B/06/2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021.
- Kirwan, B. E., Roberts, M. J. “Who really benefits from agricultural subsidies? Evidence from field-level data”. Am. J. Agric. Econ. 2016, 98, 1095–1113.
- Kopittke, P.M., Menzies, N.W., Wang, P., McKenna, B.A., Lombi, E. Soil and the Intensification of Agriculture for Global Food Security. Environ. Int. 2019, 132, 105078.
- Liu, M., Zhang, W., Wang, X., Wang, F., Dong, W., Hu, C., Sun, R. “Nitrogen Leaching Greatly Impacts Bacterial Community and Denitrifiers Abundance in Subsoil under Long-term fertilization”. Agric. Ecosyst. Environ. 2020, 294, 106885.
- Mohktar, M. S. 2019. “Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB”. SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 13 (2). 201-217.
- Nugroho, D, A., Siregar, P, A., Andannari, E., Shafiudin, Y., dan Julia, I, C. 2018. “Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: 2 (1). 70-82. <https://ejournal2.undip.ac.id>
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian; dan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
- Rachman, B dan Sudaryanto, Tahlim. 2010. “Impacts and future perspectives of fertilizer policy in Indonesia. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian”. 8(3): 193-205 DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v8n3.2010.193-205>
- Ragasa, C., Lambrecht, I., Kufoalor, D.S. 2018. “Limitations of contract farming as a pro-poor strategy: The case of maize outgrower schemes in upper west Ghana”. World Dev. 102: 30–56.
- Ragimun., Makmun., Setiawan, S. 2020. “Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia”. 10 (1). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>.
- Rahmaningsih, E., Utami, P, D., Widiyanton, D. 2021. “Distribusi Benih Jagung Manis “Virginia” Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT Tunas Agro Persada Kabupaten Boyolali”. Surya agritama. 10 (1). <http://jurnal.umpwr.ac.id>

- Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019. <http://sakip.pertanian.go.id> diunduh pada tanggal 18 Oktober 2021.
- Sindhuja, P. and Asokhan, M. 2018. "Socio Economic Characteristic of Dryland Farmers in Tiruppur District, India – An Gender Analysis". *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.* 7(03): 54-58. doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.7.03.006>
- Smith, L.C.; Frankenberger, T.R. "Does resilience capacity reduce the negative impact of shocks on household food security? Evidence from the 2014 floods in Northern Bangladesh". *World Dev.* 2018, 102, 358–376.
- Stanton, William. J dan Y. Lamarto. 1996. "Prinsip Pemasaran". Edisi 7. Erlangga. Jakarta.
- Swinnen, J.F., Maertens, M. 2007. "Globalization, privatization, and vertical coordination in food value chains in developing and transition countries". *Agric. Econ.* 2007, 37, 89–102.
- Wegren, S.K., Frode, N., Elvestad, C. The impact of Russian food security policy on the performance of the food system. *Eur. Geogr. Econ.* 2016, 57, 1–29.
- Westermann, O., Förch, W., Thornton, P., Körner, J., Cramer, L., Campbell, B. 2018. "Scaling up agricultural interventions: Case studies of climate-smart agriculture". *Agric. Syst.* 165, 283–293.
- Wijayanti, N., Masyhuri, Jamhari, Mulyo, J.H. 2019. "Performance of supply chain management for Sumbawa Forest Honey in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*". Volume XIV, Fall, 3(65): 831-841. DOI: [https://doi.org/10.14505/jaes.v14.3\(65\).18](https://doi.org/10.14505/jaes.v14.3(65).18)
- Yi, F. J., Sun, D. Q., Zhou, E. H. 2016. "Grain subsidy, Liquidity Constraints and Food Security Impact of The Grain Subsidy Program on The Grain-Sown Areas In China. *Food Policy*". 50, 114–124.